

ABSTRAK

Diketahui bahwa Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Ada tiga (3) Hukum kewarisan yang berlaku yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata (BW) dan Hukum Adat. Salah satu persoalan yang sering menimbulkan problema dalam masyarakat yaitu waris anak luar nikah. Dimana keberadaannya masih mendapat perlakuan yang tidak adil. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu diteliti mengenai: “Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui 1. Kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). 2. persamaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). 3. Perbedaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Metode yang dipakai meliputi pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan/studi dokumenter terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan anak luar nikah menurut KHI hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya, sedangkan menurut KUHPerduta anak luar nikah atau anak tidak sah, tidak mempunyai hak mewaris. Namun, dalam Pasal 272 KUHPerduta dapat diketahui bahwa dalam hukum Perdata terdapat anak yang dapat dilakukan pengakuan dan dapat disahkan yakni *natuurlijk kind*, dan juga terdapat anak-anak yang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya yakni *overspeleg kind* dan *blodsceneg*. Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerduta. Persamaan kedudukan anak di luar nikah dalam perspektif KHI maupun KUH Perdata adalah sama-sama tidak mempunyai hak kewarisan dari ayahnya. Perbedaannya adalah menurut KUHPerduta hak kewarisan anak di luar nikah dapat diberikan apabila ada pengakuan dari ayah dan/atau ibunya dan yang bisa diakui dan disahkan terhadap anak di luar nikah hanya anak alami (*natuurlijk kind*) saja. Sedangkan menurut KHI pengakuan anak luar nikah oleh ayah biologisnya tidak serta merta memiliki hak waris. Yang dapat diakui adalah anak yang lahir pada saat ayah dan ibu biologis telah melakukan pernikahan secara agama.

Kata Kunci: *Hukum Waris, kedudukan waris, anak luar nikah.*

ABSTRACT

It is known that the Inheritance Law applicable in Indonesia still does not have a legal entity that can be applied to all Indonesian citizens. There are three (3) applicable Laws of inheritance namely Islamic Law, Civil Law (BW) and Customary Law. One of the problems that often causes problems in society is the offspring of extramarital children. Where his existence is still being treated unfairly. Based on the description of the background of the above problems, it is necessary to examine: "Position of Inheritance of Extramarital Children in the Perspective of Compilation of Islamic Law and Civil Law (Burgerlijk Wetboek)". This thesis aims to find out 1. the position of inheritance of Extramarital Children in the perspective of Compilation of Islamic Law and Civil Law (Burgerlijk Wetboek). 2. the equal position of the inheritance of Extramarital Children in the perspective of Compilation of Islamic Law and Civil Law (Burgerlijk Wetboek). 3. The differences in the position of inheritance of Extramarital Children in the perspective of Compilation of Islamic Law and Civil Law (Burgerlijk Wetboek). The method used includes a normative juridical approach with qualitative descriptive research specifications. The methods of data collection include literature studies / documentary studies on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using qualitative analysis. The results obtained from the study show that the position that extramarital children according to KHI only have inheritance relationships with their biological mothers and mother's family. whereas according to the Civil Code, the extramarital children or unauthorized children have no right to inherit. However, in Article 272 the Civil Code it can be seen that in Civil law there are extramarital children who can be recognized and can be legalized namely *natuurlijk kind*, and also Extramarital Children who cannot be recognized against it, namely *overspeleg kind* and *blodsceneg*. With this acknowledgment arises the civil relations between extramarital children and parents who admit it as stipulated in Article 280 of the Civil Code. The similarity of the position of extramarital children in the perspective of KHI and the Civil Code is that they do not have inheritance rights from their father. The difference is according to the Civil Code the inheritance rights of extramarital children can be given if there is an acknowledgment from his father and / or mother and that which can be recognized and ratified for extramarital children is only natural children (*natuurlijk kind*). Whereas according to KHI, only the recognition of extramarital children by their biological fathers does not necessarily have inheritance rights. Those who can be recognized is the child was born when the biological father and mother have carried out a religious marriage.

Keywords: inheritance law, inheritance position, extramarital children.